

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

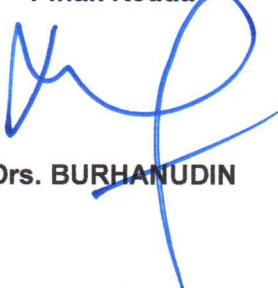
Nama : **HARLI AGUSTA,ST**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur**
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. BURHANUDIN**
Jabatan : **Bupati Belitung Timur**
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

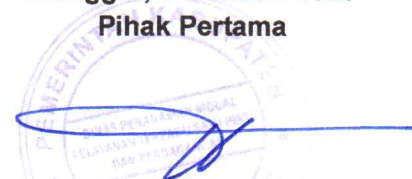
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Drs. BURHANUDIN

Manggar, 5 Januari 2023

Pihak Pertama


HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19750821 200212 1 005

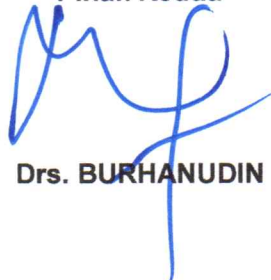
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	79 = B
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B > 60 – 70
		3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	80,00 persen
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tinggi
		5	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	84 persen
		6	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	30 persen
		7	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	27,50 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	8	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	83,33 persen
		9	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	71,43 persen
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	10	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
		11	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen
		12	Investor Baru yang Berinvestasi	33 investor
		13	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	59 investor
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	14	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rp 254.902.923
		15	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,85 persen
		16	Persentase Data Informasi Industri Di SIINAS	58,33 persen
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	17	PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)	559,94 Milyar Rupiah
		18	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 persen
		19	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3,59 persen
		20	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	1 produk
		21	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	72,50 persen
		22	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku	72 persen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.216.401.236	APBD II
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 32.282.400	APBD II
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 132.176.300	APBD II
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 203.940.500	APBD II
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 546.437.000	APBD II
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 46.361.000	APBD II
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.389.618.000	APBD II
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.638.868.500	APBD II
9. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 20.000.000	APBD II
10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 238.956.260	APBD II
11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 2.945.719.400	APBD II
12. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 4.272.200	APBD II
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 59.615.500	APBD II

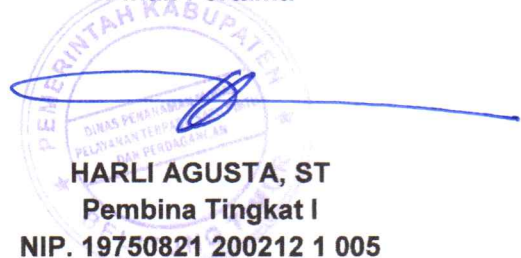
Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN

Manggar, 5 Januari 2023

Pihak Pertama



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19750821 200212 1 005